

STRATEGI POLITIK DALAM PENGENTASAN DESA TERTINGGAL

Rusdiono¹, Ira Patriani², Ahirul Habib Padilah³, Dadi Sunarya Usfa Yursa⁴,
Annisa Rizqa Alamri⁵, Eka Apriyani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

Email: rusdiono@fisip.untan.ac.id; ira.patriani@fisip.untan.ac.id; ahirul.habib@fisip.untan.ac.id;
e2072221037@student.untan.ac.id; annisa.rizqa@fisip.untan.ac.id; eka.apriyani@fisip.untan.ac.id

Artikel histori:

Submit: 16-09-2023

Revisi: 20-09-2023

Diterima: 03-10-2023

Terbit: 22-10-2023

Kata Kunci:

*Alternative Strategies,
Alleviation,
Disadvantaged Villages*

Korespondensi:

ahirul.habib@fisip.untan.ac.id

Abstrak: *The village development program run by the government in reducing poverty in rural areas, in its implementation, especially for all parties, is still in doubt. The village categories based on the Highly Underdeveloped Village Index (IDM) and Disadvantaged Villages show a correlation with the condition of the poor population in these village categories. For this reason, demands for a joint political strategy between the government and the community are urgently needed, related to strengthening decentralization, changing the role of the local bureaucracy and building community participation in efforts to alleviate underdeveloped villages or poor villages in order to contribute to reducing poverty in rural areas. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach with a purpose to make a charm systematically, factual and accurate facts and population traits or certain areas. The results of the research show that on the Village Government service side it is still not on target, programs that should be for the poor are also enjoyed by the rich. So that the poor do not develop and do not increase their standard of living, this causes the village to still be in the category of underdeveloped villages, even very underdeveloped.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan sampai akhir pembangunan jangka panjang (PJP) I, cenderung bersifat normatif dan seragam serta kurang mengungkapkan variasi lokal yang memanifestasikan orisinitas dan kepentingan atau kehidupan penduduk setempat. Kecenderungan ini akan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah riil masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan, produktivitas yang rendah, terbatasnya kesempatan kerja dan sebagainya. Seharusnya pembangunan memfokuskan pada dimensi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Dudley Seers bahwa indikator terbaik

pembangunan adalah mengurangi atau memberantas kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, dengan tidak menampik pertumbuhan ekonomi (Leonard & Marshall, 1982).

Kemudian (Korten & Klaus, 1984) mengemukakan bahwa program pembangunan komunitas pada skala luas yang dilaksanakan pada negara berkembang, tidak lebih dari seperangkat program dan target baru yang dirumuskan dari pusat dengan pelaksana struktur-satruktur birokrasi yang konvensional, akan tidak tanggap terhadap preferensi atau kebutuhan-kebutuhan rakyat setempat (Kumorotomo, 1992).

Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang bersifat normatif dan seragam serta kurang berbasis lokal tersebut, terlihat pada akhir pembangunan jangka panjang (PJP) I, setelah selama 25 tahun pemerintah melaksanakan pembangunan desa, ternyata masih terdapat 20.633 desa (31,5 %) tergolong tertinggal di seluruh Indonesia. Dengan perincian desa tertinggal yang berada di perkotaan sebanyak 1.008 desa (14,7 %) dan di daerah pedesaan sebanyak 19.625 desa (33,4 %) (Sumodiningrat, 1998).

Saat ini, keteringgalan desa sampai sekarang masih menjadi persoalan nasional, demikian pula untuk di provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dikemukakan oleh Gubernur Sutarmidji “Saat ini jumlah desa mandiri di Kalbar masih memprihatinkan. Pasalnya dari total 2.031 desa hanya ada satu desa mandiri saja (Oxtora, 2018).

Kemudian Berdasarkan hasil perhitungan indeks desa membangun (IMD) Kalbar Tahun 2018, dari total desa yang ada di Kalimantan Barat masuk dalam 677 Desa kategori sangat tertinggal, 928 desa kategori tertinggal, 372 desa kategori berkembang, 53 desa kategori maju dan 1 desa kategori mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kategori desa yang ada di Kalbar sebagian besar yaitu 79,03 % masuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal, yaitu 33,33 % kategori sangat tertinggal dan 45,70 % kategori tertinggal.

Adapun secara nasional dikemukakan oleh Kepala BPS RI Suhariyanto “*Jumlah desa tertinggal sesuai data potensi desa berkurang dari 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada 2018*”. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa, Indeks pembangunan desa menunjukkan perbaikan status desa. Desa tertinggal berkurang 6.518 desa jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sementara desa mandiri bertambah 2.665 desa.

Hal ini menegaskan bahwa kategori desa yang ada di Kalbar sebagian besar yaitu 79,03 % masuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal, yaitu 33,33 % kategori sangat tertinggal dan 45,70 % kategori tertinggal. Realisasi dalam meningkatkan kategori desa tersebut menuju desa berkembang, maju bahkan mandiri tentunya dapat dicapai, seiring dengan adanya kebijakan pemerintah daerah berupa alokasi dana desa (ADD) maupun kebijakan dari pemerintah pusat berupa program dana desa (DD) yang semakin meningkat jumlah besaran anggarannya.

“Sejak diluncurkan pada tahun 2015 pemerintah terus meningkatkan nominal program dana desa. Pada 2015 anggaran dana desa sebesar Rp. 20 Triliun, tahun 2016 Rp. Rp. 47 Triliun, kemudian tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp. 60 Triliun. Rencananya pada 2019 pemerintah mengucurkan Rp. 73 Triliun untuk dana desa. “*Artinya total sampai sekarang saja sudah Rp. 187 Triliun sampai akhir tahun ini. Hati-hati mengelolah dana sebesar ini Rp. 187 Triliun, belum lagi tahun depan tambah Rp. 73 Triliun*”, jelasnya. Jokowi kemudian mengingatkan para

pendamping desa, agar berhati-hati dalam mengelola dana tersebut. Ia juga berharap Rp. 187 Triliun itu harus dirasakan sepenuhnya manfaatnya bagi masyarakat desa” (Martiar, 2018).

Berdasarkan Indeks pembangunan desa (IPD) dari kelima dimensi; menunjukkan *“dimensi penyelenggaraan pemerintah desa pada pendataan tahun 2018 naik paling tinggi”* dibandingkan tahun 2014, yakni 9,81 poin menjadi 71,40. Indikatornya antara lain; penerimaan desa meningkat, desa memiliki sekretaris desa dan pendidikan kepala desa minimal SMA Sederajat. Sedangkan *“dimensi IPD dengan kenaikan paling rendah pada pelayanan dasar”* yang mencakup akses pendidikan setingkat SMA, akses ke apotek dan akses ke rumah sakit. Pelayanan dasar naik 0,92 poin dari 56,37 menjadi 57,65. Sementara itu dimensi IPD lainnya yakni pelayanan umum naik 1,88 poin, transportasi naik 3,5 poin dan kondisi infrastruktur naik 5,42 poin.

Lebih lanjut Direktur Indef Enny Sri Hartati mengemukakan *“dengan banyaknya dana yang digelontorkan pemerintah ke desa, jumlah desa tertinggal sudah pasti berkurang. Namun indikator dalam IPD justru belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berkurangnya desa tertinggal itu pasti. Kalau tidak malah aneh. Akan tetapi jika dilihat dari IPD, peningkatan dimensi pelayanan dasar tidak signifikan. Padahal itu yang utama, faktanya justru penyelenggaraan pemerintahan desa yang meningkat, artinya terkait dengan administrasi” (Martiar, 2018).*

Berdasarkan data tersebut menegaskan masih banyaknya kategori desa yang termasuk sangat tertinggal dan tertinggal. Selain itu, menunjukkan pula berbagai program pembangunan perdesaan untuk mengejar ketertinggalan desa dan terutama yang ditujukan untuk pengentasan kesejahteraan masyarakat di perdesaan belum sebagaimana mestinya. Hal ini, dalam pelaksanaannya hendaknya mengedepankan program yang lebih sedikit menimbulkan ketimpangan dan jauh dari politisasi, namun lebih mengarahkan kepada usaha pencapaian pemerataan atau keadilan serta memberikan manfaat bagi semua orang tanpa kecuali yang ada di perdesaan.

METODE PENELITIAN

Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut (Suryabrata, 2012) adalah bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Pemilihan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan secara menyeluruh dan sistematis terhadap proses yang terjadi dari suatu obyek yang diteliti yaitu Strategi Politik dalam Pengentasan Desa Tertinggal, dengan memberikan gambaran secara detail melalui kata-kata atau kalimat berdasarkan hasil wawancara mendalam yang bersumber dari informan yang diperkuat oleh data hasil observasi dan studi dokumentasi dan dipisah-pisahkan menurut kategori tertentu dalam menggambarkan realita yang kompleks di lapangan secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman makna dari obyek yang diteliti, yaitu Strategi Politik Pengentasan Desa Tertinggal. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini, untuk lebih memahami

makna atau menuju pemahaman yang mendalam tentang makna dari objek yang diteliti guna memperoleh konsep baru implementasi kebijakan publik.

PEMBAHASAN

Strategi Penguatan Desentralisasi

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin yang sebagian besar berada di pedesaan merupakan determinan struktural yang dapat menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Sejalan dengan itu penerapan desentralisasi dimaksudkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah lokal untuk dapat menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

Rohdewohld, (1995) mengemukakan bahwa desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan didalam memanfaatkan dan menggali sumber-sumber atau potensi untuk pembangunan daerah, dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas di dalam memberikan pelayanan publik. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa Desentralisasi dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memanfaatkan dan menggali segala potensi yang dimiliki daerah di dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Dikemukakan oleh Ranis dan Stewart bahwa efek positif dari desentralisasi, akan meningkatkan dalam memusatkan perhatian pemanfaatan sumber untuk sosial dan infrastruktur ekonomi yang menguntungkan di dalam pelayanan kebutuhan dasar dan proyek infrastruktur yang kecil-kecilan, meningkatkan partisipasi ekonomi melalui pergeseran atau merubah perhatian pengeluaran ke arah proyek infrastruktur yang kecil-kecilan, meningkatkan efisiensi di dalam pemanfaatan sumber dan meningkatkan kesamaan pendistribusian pendapatan di dalam suatu tempat dan sekitarnya.

Pelaksanaan desentralisasi akan memberi makna dan perhatiannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal bebas dari belenggu kemiskinan. Pemanfaatan dan penggalan sumber-sumber atau potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat melalui program yang diarahkan kepada proyek infrastruktur kecil-kecilan yang berorientasi ke ekonomi, di dalam rangka meningkatkan kesamaan atau pemerataan pendistribusian pendapatan di dalam suatu wilayah. Dengan sifat program yang berskala kecil diharapkan semua warga dapat memiliki kesempatan dalam berpartisipasi dan menikmati secara adil.

Tuntutan desentralisasi dalam pembangunan pedesaan adalah bagaimana potensi sumber-sumber yang ada digali dengan kewenangan sepanjang waktu, dan mengadaptasikan kondisi spesifik lokal kedalam berbagai lapangan, dengan cara atau jalan melalui pemberdayaan desa, diantaranya melibatkan pemerintah pusat, dengan menempatkan aparat pemerintah pusat (kementerian) atau pemerintah daerah dengan bantuan keuangan dari pusat.

Kemudian problema selanjutnya bagaimana mendudukan posisi yang tepat bagi keterlibatan kedua organisasi tersebut tanpa didasarkan pada pilihan pusat atau lokal dalam pembangunan desa, tetapi merupakan kombinasi diantara keduanya. Permasalahan yang khas sesungguhnya adalah bagaimana bentuk kombinasi diantara keduanya, apakah dengan pembagian tanggung jawab atau hanya sekedar menjalin hubungan kerja sama yang baik atau saling mendukung diantara mereka, sebagai suatu sistem yang kuat secara bersama dan efektif dalam pembangunan desa.

Dilema tersebut sekiranya tidak perlu dipersoalkan bagaimana keduanya dapat berjalan sejajar dan bersinergi secara bersamaan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip desentralisasi. Keberadaan organisasi lokal dapat membantu di dalam memberikan segala informasi di dalam memetakan potensi yang dimiliki untuk dimanfaatkan dan digali dalam mensukseskan suatu program. Di samping itu, turut pula diperhatikan suara masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak program tersebut baik yang datangnya secara individual maupun organisasi, sehingga akhirnya program tersebut mendapat dukungan, kritikan, pandangan maupun gerakannya di dalam melihat program agar tidak melenceng dari maksud dan tujuan semula.

Mubyarto & Kartodirdjo, (1988) mengemukakan hal yang diharapkan dari otonomi adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan otonomi daerah kepentingan, kebutuhan dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi pertama dan utama dalam setiap langkah kegiatan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan program pembangunan desa tergantung pada ketersediaan sumber yang dimiliki untuk digali dan dimanfaatkan serta disesuaikan dengan kondisi spesifik dari lokal, dan dalam pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari beberapa aktor diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan partisipasi organisasi lokal.

Pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi memberdayakan kaum miskin pada desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, dimana keterlibatan struktur partisipasi lokal dan pemerintahan yang didalamnya bersipat inklusif serta ditujukan untuk semua populasi dan wilayah, dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan adanya pertentangan interes tertentu diantara mereka, yang akhirnya mengarah kepada ketimpangan atau ketidakadilan. Maka dari itu untuk program pembangunan desa yang berorientasi memberdayakan kaum miskin maupun pembangunan desa tertinggal sepatutnya bersipat eksklusif, artinya semua pelayanan ditujukan khusus bagi kaum miskin di dalam meningkatkan harkatnya, dan dikelola oleh orang-orang miskin itu sendiri atau lembaga yang memiliki perhatian penuh (*concern*) kepada kaum miskin.

Kemudian perlu dipikirkan mengenai orientasi program yang diarahkan kepada mayoritas kaum miskin di perdesaan kategori sangat tertinggal dan tertinggal, alangkah baiknya dilaksanakan tanpa adanya struktur partisipasi lokal atau organisasi yang mengikat keanggotaan mereka untuk kaum miskin sebagai organisasi alternatif, yang diperlukan di dalam mengeliminir hal-hal yang merugikan kepentingan kelompok dikarenakan adanya dominasi elite lokal. Dengan demikian yang mendasari keberadaan organisasi alternatif hanya untuk melindungi suatu kelompok dari dominasi elite lokal.

Dominasi elite lokal yang berlebihan akan berdampak tidak saja terbatas pada masalah administrasi, tetapi akan meluas pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat. Birokrasi dengan kekuasaan yang melekat pada dirinya harus ditaati dan dipatuhi, apabila hal ini tidak sungguh-sungguh dijalankan akan menimbulkan arogan yang berlebihan di dalam menentukan jalannya administrasi sekehendak hati, dan akhirnya akan mengurangi arti keberadaannya dalam proses akselerasi dan maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Timbulnya organisasi alternatif merupakan akibat dari ketidakpercayaan masyarakat atas program pembangunan yang dilaksanakan mengarah kepada ketidakadilan atau ketimpangan, dan tidak dirasakan manfaatnya secara maksimal khususnya bagi kaum miskin, bahkan pelayanan yang seharusnya diperuntukkan baginya masih direbut juga oleh orang kaya maupun elite lokal dengan dominasi yang dimilikinya.

Efektifitas program pembangunan desa yang ditujukan untuk kaum miskin di desa sangat tertinggal dan desa tertinggal ditantang bagaimana mengurangi atau meminimalisasi peran pemerintah, karena dalam kenyataannya kompetensi aparat dan sipat progresif dari program belum maksimal serta adanya tarik menarik interes tertentu diantara berbagai pihak, yang selanjutnya mengarah kepada ketimpangan dan ketidakadilan di dalam menjalankan program tersebut.

Kemudian perlu kiranya dipikirkan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi semua pihak di luar pemerintah, seperti organisasi bisnis atau organisasi sukarela yang ada di masyarakat untuk berkesempatan dan berkompetisi di dalam memberikan pelayanan kepada kaum miskin diperdesaan sangat tertinggal dan tertinggal, sehingga diharapkan dapat menjangkau secara keseluruhan dan bertambahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada kaum miskin.

Bertolak dari fenomena tersebut kiranya pelaksanaan desentralisasi, perlu memperhatikan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat dari Korten, yang menekankan perkawinan antara *delivered development* atau *top-down strategy* dengan *participatory development*. Dengan demikian dalam proses pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya melibatkan mobilisasi sosial, tetapi juga pelimpahan wewenang (*devolution of power*). Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menciptakan suatu institusi dan pola kebijaksanaan yang memungkinkan masyarakat mengerjakan dan mengendalikan inisiatif sendiri? Pemecahannya adalah sebagaimana yang disarankan oleh Korten : 1) perlunya intervensi yang harus terus-menerus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia secara mandiri, 2) perlunya pengembangan struktur-struktur dan proses organisasional yang berfungsi menurut prinsip-prinsip *self organizing system*, 3) pengembangan sistem-sistem produksi dan konsumsi yang terorganisasi secara teritorial berdasarkan pemilikan dan penguasaan lokal (Korten & Klaus, 1984).

Selanjutnya seiring dengan hal tersebut Korten memperkenalkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya lokal (*community-based resources management*) yang mengubah peranan birokrasi pemerintahan dari merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk rakyat, berubah menjadi aktor dalam menciptakan kondisi yang menimbulkan kemampuan bagi rakyat dan masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri. Dengan kata lain peranan pemerintah menjadi katalis dalam mempercepat proses pembangunan yang berpusat kepada kemandirian lokal (Leonard & Marshall, 1982).

Perhatian di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan sangat tertinggal dan tertinggal hendaknya menjadikan perhatian dari pemerintah secara sungguh-sungguh, melalui program-program pembangunan yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat serta memberikan kesempatan bagi mereka, untuk memecahkan permasalahannya dan kemudian pemerintah mendorong dan meresponnya dengan baik, sehingga tercipta perpaduan pembangunan yang datangnya dari bawah dan atas (*bottom-up dan top-down*) yang akan menjamin kelangsungan dan kesinambungan pembangunan.

Desentralisasi dalam program pembangunan masyarakat miskin maupun pada desa sangat tertinggal dan tertinggal, dalam pelaksanaannya memerlukan pengorganisasian yang efektif. Arah menuju kesana perlu dipersiapkan komitmen yang kuat, kemampuan dalam menggali segala sumber atau potensi, keterampilan teknis dan keterampilan adaptasi dari pelaksana atau aparatur serta yang terpenting dukungan partisipasi komunitas dalam setiap program yang dijalankan.

Akhirnya untuk menjalankan desentralisasi, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan kaum miskin di pedesaan dan pemberdayaan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan baik dan bermakna positif, sepatutnya dikelola oleh suatu pemerintahan daerah beserta jajarannya yang memiliki komitmen, berkemampuan baik, dalam arti manajerial maupun dalam arti etika dan moral di dalam pemerintahan yang demokratis.

Strategi Perubahan Peran Birokrasi Lokal

Kompleksnya pembangunan yang ditujukan di dalam memberdayakan kaum miskin terutama di daerah pedesaan sangat tertinggal dan desa tertinggal, diperlukan adanya pemimpin yang memiliki komitmen dan perhatian terhadap kaum miskin dan wilayah sangat tertinggal dan tertinggal. Banyak kriteria yang dapat dijadikan ukuran yang mengarah kepada hal tersebut, namun yang lebih terpenting adalah apakah pemimpin dapat menampung dan menyalurkan kepentingan-kepentingan bagi pengikutnya dan kuatnya anggota-anggota masyarakat di dalam mode eksistensi yang lazim di tengah lingkungannya serta tidak adanya perbedaan kepentingan diantara mereka baik bagi elite maupun non elite.

Keberadaan elite birokrasi lokal yang sebagian besar waktunya dipergunakan, untuk memimpin masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kenyataannya tidak bisa memaksa kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak semauanya, di tengah-tengah sebagian besar masyarakat kaum miskin. Pemahaman elite lokal di dalam memahami kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya terutama kaum miskin serta interaksi di antara struktur sosial di dalam masyarakat dengan karakter dari program yang dijalankan, akan berindikasi terhadap kecocokan antara elite lokal dengan kepentingan kaum miskin. Hal ini tentunya akan membawa di dalam mempercepat proses pencapaian sasaran program secara adil dan merata atau tidak menimbulkan adanya ketimpangan.

Pemerintahan birokrasi lokal yang inklusif dimana elite lokal ditantang, untuk lebih efektif dalam mengurangi berbagai macam perbedaan kepentingan diantara mereka, serta adanya tuntutan kompetisi dan opsi dari mereka. Hal ini, akan memacu terciptanya kepemimpinan yang memiliki komitmen kepada kepentingan masyarakat luas, dengan program yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan. Komitmen yang kuat dari elite lokal terhadap kaum miskin serta pelaksanaan program yang sasarannya mengarah kepada keadilan dan pemerataan, merupakan suatu syarat desentralisasi agar dapat dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya komitmen yang rendah dari elite lokal membuat sasaran program mengarah kepada ketimpangan.

Wujud komitmen dari elite birokrasi lokal yang secara kontinyu mempengaruhi komunitas, dituntut untuk lebih responsif terhadap kepentingan mayoritas kaum miskin, pedesaan sangat tertinggal dan tertinggal. Hal tersebut dapat diupayakan melalui tiga kondisi yang saling berkaitan di dalam menjalankan kepemimpinannya, diantaranya 1) adanya kompetisi dalam kepemimpinan, 2)

dukungan kepada kaum miskin sebagai komponen dan strategi yang baik dan diperlukan dalam menjalankan kepemimpinan, 3) keseriusan elite lokal yang secara langsung memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum miskin di dalam menjalankan kepemimpinannya.

Selain didukung oleh orang atau personal yang cakap dan memiliki komitmen yang tinggi didalam setiap program dibutuhkan pula suatu institusi dengan komitmen yang positif di dalam menjalankan program pemberdayaan kaum miskin, dan pemberdayaan desa, namun dalam kenyataannya di lapangan sangat tergantung pada politik nasional dan kelembagaan yang memiliki perhatian dalam pembangunan nasional. Misalnya di dalam konteks sistem politik apakah mendukung kaum miskin atau tidak, mendukung desa sangat tertinggal dan tertinggal atau tidak, terutama instansi pemerintah apakah lebih progresif atau tidak. Adapun faktor yang menentukan sipat tersebut diantaranya aliansi eksternal, profesional dan pola kelembagaan di dalam sosialisasi. Namun dukungan yang lebih potensial yakni tersedianya sumber daya dan kekuasaan atau kewenangan organisasi, seperti kewenangan di dalam pengawasan khusus atas sejumlah besar sumber daya dan kewenangan penuh di dalam menyiapkan kondisi untuk perubahan yang progresif. Hal ini lazimnya disebut dengan struktur desentralisasi.

Interaksi di antara maksud dan tujuan (*content*) program pembangunan perdesaan dengan kepentingan elite lokal begitu penting dan sangat berpengaruh di dalam mengarahkan tipe desentralisasi dan tipe organisasi yang akan dipersiapkan, dibangun dan dikembangkan. Di samping itu, responsif dari pemimpin lokal, organisasi yang inklusif, persiapan organisasi atau pemerintah lokal atas kewenangan otonomi, serta diperlukannya organisasi lokal alternatif yang didukung bersama oleh kekuatan eksternal, di dalam memperjuangkan kaum miskin di daerah pedesaan sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Efektivitas program pembangunan desa yang ditujukan untuk kaum miskin di daerah pedesaan sangat tertinggal dan desa tertinggal ditantang bagaimana mengurangi atau meminimalisasi peran pemerintah, karena dalam kenyataannya kompetensi aparat dan sipat progresif dari program belum maksimal serta adanya tarik menarik interes tertentu diantara berbagai pihak, yang selanjutnya mengarah kepada ketimpangan dan ketidakadilan di dalam menjalankan program desa di wilayah tersebut.

Bertolak dari fenomena di atas kiranya pelaksanaan program pembangunan desa terutama diperdesaan sangat terpencil dan terpencil, kiranya perlu memperhatikan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat dari Korten, yang menekankan “perkawinan antara *delivered development* atau *top-down strategy* dengan *participatory development*. Dengan demikian dalam proses pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya melibatkan mobilisasi sosial, tetapi juga pelimpahan wewenang (*devolution of power*). Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menciptakan suatu institusi dan pola kebijaksanaan yang memungkinkan masyarakat mengerjakan dan mengendalikan inisiatif sendiri. Pemecahannya adalah sebagaimana yang disarankan oleh Korten: 1) perlunya intervensi yang harus terus-menerus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia secara mandiri, 2) perlunya pengembangan struktur-struktur dan proses organisasional yang berfungsi menurut prinsip-prinsip *self organizing system*, 3) pengembangan sistem-sistem

produksi dan konsumsi yang terorganisasi secara teritorial berdasarkan pemilikan dan penguasaan local” (Korten & Klaus, 1984).

Selanjutnya Korten (Tjokrowinoto, 1999) memperkenalkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya lokal (*community-based resources management*) yang mengubah peranan birokrasi pemerintahan dari merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk rakyat, berubah menjadi aktor dalam menciptakan kondisi yang menimbulkan kemampuan bagi rakyat dan masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri. Dengan kata lain peranan pemerintah menjadi katalis dalam mempercepat proses pembangunan yang berpusat kepada kemandirian lokal.

Strategi Membangun Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini belum merata, pertumbuhan ekonomi yang sering dikumandangkan tidak menyentuh kaum miskin di pedesaan. Hal ini tampak sampai akhir pelaksanaan pembangunan jangka panjang (PJP) I, masih ada sekitar 31,5 % desa yang dikategorikan desa tertinggal atau desa miskin.

Berdasarkan data terakhir menunjukkan masih adanya desa tertinggal baik secara nasional maupun daerah, seperti halnya desa di provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar kategori desa yaitu 79,03 % masuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal, yaitu 33,33 % kategori sangat tertinggal dan 45,70 % kategori tertinggal. Hal ini, menegaskan bahwa sebagian besar desa yang ada di Kalbar adalah desa miskin.

Masalah hakiki yang menghimpit pedesaan adalah kemiskinan, disamping karena kategori desa yang masih sangat tertinggal dan tertinggal serta sangat sempitnya peluang penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan pendapatan yang memadai, yang tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Mubyarto & Kartodirdjo, 1988) mengemukakan bahwa “*berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk kaum miskin di pedesaan diantaranya program tata guna tanah, peningkatan teknologi pertanian yang cocok untuk mendukung sumber daya petani miskin, mengembangkan pasar dan mensuplai bahan-bahan untuk meningkatkan hasil panen kaum miskin, pelayanan pemeliharaan kesehatan dasar, meningkatkan tenaga kerja dalam kontruksi jalan desa, membangun sistem air bersih, dan pekerjaan masyarakat desa lainnya*”.

Berbagai program yang ditawarkan tersebut, dalam pelaksanaannya tentu memerlukan suatu pengorganisasian yang efektif. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah komitmen yang kuat dari birokrasi maupun pelaksana atau aparatur yang menjalankan atau memberikan pelayanan program bagi kaum miskin di pedesaan, kemampuan pelaksana atau aparatur yang menjalankan di dalam menggali sumber-sumber atau potensi, keterampilan teknis dan kemampuan adaptasi pelaksana dalam menjalankan program, serta perlunya partisipasi dari komunitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Komitmen yang sungguh-sungguh dari birokrasi pelaksana program, baik sebagai institusi maupun aparatur sangat diharapkan di dalam upaya untuk menggali segala potensi yang dimiliki, termasuk didalamnya lembaga kemasyarakatan yang telah ada dan tumbuh di pedesaan. Pada umumnya di pedesaan di Indonesia terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki kemampuan memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi. Disini diperlukan kemampuan untuk menggali lembaga-lembaga tadi secara tepat, menganalisa sipat

dan hakekatnya ke arah kemampuan yang lebih baik untuk memecahkan masalah-masalah pedesaan yang semakin beraneka ragam.

Program pembangunan desa terutama di perdesaan yang sangat tertinggal dan tertinggal, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dalam pelaksanaannya memerlukan adanya suatu pengorganisasian yang matang di dalam memulainya. Diawali oleh persiapan dari pelaksana program itu sendiri, mulai dari komitmen, kemampuan, ketrampilan teknis dan kemampuan adaptasi serta menggalang partisipasi masyarakat lokal di dalam mensukseskan program tersebut. Di samping itu, dalam pencapaian partisipasi tersebut dibutuhkan pelaksana atau aktor dalam program yang memiliki etika dan moral, sehingga dapat mengurangi tarik menarik kepentingan diantara berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan program pembangunan pedesaan yang bertujuan memberdayakan kaum miskin, memberdayakan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal secara baik dan bermakna positif, sepatutnya dikelola oleh suatu pemerintahan daerah beserta jajarannya maupun masyarakat secara keseluruhan, yang memiliki komitmen, berkemampuan baik, kepemimpinan dan strategi program pembangunan di dalam pemerintahan yang demokratis. Di samping itu, disesuaikan pula dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam memecahkan permasalahannya. Adapun pemerintah berkewajiban untuk mendorong dan meresponnya dengan baik, sehingga tercipta perpaduan pembangunan yang datang dari bawah dan atas (*bottom up - top down*) secara seimbang.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan diharapkan dapat membantu memobilisasi di dalam menggali sumber-sumber lokal, memfasilitasi atau mewadahi di dalam menghimpun segala informasi yang diperlukan bagi pelaksana program, untuk mengadaptasi program ke dalam kondisi lokal, dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam program pembangunan merupakan suatu promosi di dalam perubahan sosial dan prosedur atau mekanisme di dalam membawa suatu transformasi di tengah masyarakat. Adapun di dalam mewujudkan partisipasi lokal tersebut dimulai, dengan membangun dan memprioritaskan struktur permintaan pelayanan publik yang dianggarkan atau didanai secara berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat tersebut diperlukan, dalam rangka menghimpun segala informasi, memetakan kemampuan dan kekuatan potensi lokal untuk digali secara maksimal. Di samping itu, partisipasi lokal membantu pula di dalam mempercepat proses perubahan sosial dan transformasi teknologi yang amat diperlukan di dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, bagi pelaksana program di lapangan dapat menempatkan dan menentukan skala prioritas program, sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, untuk direncanakan dan dianggarkan secara berkelanjutan dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Pengentasan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal hendaknya menjadi perhatian utama dari birokrasi pemerintah. Kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal secara eksplisit menunjukkan pula tingkat kemiskinan dari warganya. Peningkatan taraf hidup masyarakat miskin di perdesaan dengan kategori tersebut hendaknya dijadikan perhatian dalam setiap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Berbagai program

tersebut perlu dipersiapkan dan dirancang dengan matang dengan keterlibatan berbagai pihak, baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat desa, untuk bersama-sama saling membahu dalam memberdayakan desa sangat tertinggal dan tertinggal serta memberdayakan kaum miskin yang ada diperdesaan tersebut agar kesejahteraannya meningkat.

Program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat miskin diperdesaan tidak jarang didalam pencapaian sasarannya tidak dinikmati oleh kaum miskin secara maksimal, dikarenakan sasaran pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada kaum miskin tidak jarang direbut pula oleh kaum kaya dan elite lokal yang ada di desa maupun pada struktur lainnya, melalui dominasi yang dimiliki, serta di dalam pelaksanaan program tidak menutup kemungkinan terjadinya tarik menarik berbagai kepentingan dari semua pihak yang terlibat.

Dampak dari semuanya ini berakibat mutu program yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak seperti yang diharapkan. Untuk itu, desentralisasi dibutuhkan dalam mengeliminir hal tersebut, dengan dibukanya kesempatan yang luas bagi organisasi di luar pemerintah seperti, organisasi sukarela maupun bisnis untuk berkompetisi di dalam pelaksanaan program kepada masyarakat miskin agar dapat lebih efektif dan berkualitas.

Setiap program pembangunan desa terutama bagi orang miskin maupun bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, yang terpenting bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan, sepatutnya disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memecahkan permasalahannya, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mendorong dan meresponnya dengan baik, sehingga tercipta perpaduan pembangunan yang datang dari bawah dan atas (*bottom up- top down*) secara seimbang.

REFERENSI

- Korten, D. C., & Klaus, R. (1984). *People Centered Development*. Kumarian Press.
- Kumorotomo, W. (1992). *Profil Desa Tertinggal*. BAPENAS.
- Leonard, D. K., & Marshall, D. R. (1982). *Institutions of Rural Development for The Poor*. University of California.
- Martiar, N. A. D. (2018, December 11). Kesempatan untuk Membangun Desa. *KompasId*.
- Mubyarto, & Kartodirdjo, S. (1988). *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Liberty.
- Oxtora, R. (2018, November 18). Kapolda Kalbar dukung program pembentukan desa mandiri. *AntaraNews*.
- Rohdewohld, R. (1995). *Public Administration in Indonesia*. Montech Pty Ltd.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Lemhanas.
- Suryabrata, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Tjokrowinoto, M. (1999). *Pembangunan Dilema dan Tantangan (II)*. Pustaka Jaya.